

ANALISIS MANFAAT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI STUDI KASUS: APLIKASI KIPAPP BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

Ayu Wulan Sari¹⁾, Nori Wilantika²⁾, Khairiyah Rizkiyah³⁾

1 Politeknik Statistika STIS

2 Badan Pusat Statistik

email: awulan086@gmail.com, wilantika@stis.ac.id

Abstract

Digital transformation in public administration requires government institutions not only to develop but also to evaluate the effectiveness of their information systems. Statistics Indonesia (BPS) has implemented the KiPApp application as a performance management tool for civil servants; however, its tangible benefits have not yet been systematically assessed. This raises the question of whether KiPApp truly contributes to improving organizational performance quality while ensuring resource efficiency. This study addresses the issue by conducting a benefit analysis of KiPApp using a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews, processed using the Generic IS/IT Benefits Table to identify benefits, codified, and further analyzed through causal mapping to obtain a comprehensive evaluation of outcomes. The findings reveal six major benefits of KiPApp implementation: improving the quality of work outputs (IQU-01), enhancing planning accuracy (IAC-04), improving decision-making accuracy (IAC-05), strengthening organizational image through regulatory compliance (IIM-03), accelerating the decision-making process (APR-08), and reducing printing and stationery costs (RCO-10). Quantitatively, the application generates potential cost savings of approximately IDR 244 million annually.

Keywords: KiPApp, performance management information system, benefit evaluation, Generic IS/IT Table

Abstrak

Transformasi digital dalam birokrasi menuntut setiap instansi pemerintah untuk tidak hanya mengembangkan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas sistem informasi yang digunakan. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengimplementasikan aplikasi KiPApp sebagai media manajemen kinerja pegawai, tetapi hingga saat ini manfaat nyata dari aplikasi tersebut belum pernah dikaji secara sistematis. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah KiPApp benar-benar mampu mendukung peningkatan kualitas kinerja organisasi sekaligus efisiensi sumber daya. Penelitian ini menawarkan solusi dengan melakukan analisis manfaat KiPApp menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, kemudian diolah menggunakan Tabel Generik SI/TI untuk mengidentifikasi manfaat, dikodifikasi, serta dianalisis keterkaitan sebab-akibatnya hingga diperoleh evaluasi manfaat akhir. Hasil penelitian menunjukkan enam manfaat utama implementasi KiPApp, yaitu: meningkatkan kualitas hasil kerja (IQU-01), meningkatkan akurasi perencanaan (IAC-04), meningkatkan akurasi keputusan (IAC-05), meningkatkan citra organisasi karena kepatuhan terhadap aturan (IIM-03), mempercepat proses pengambilan keputusan (APR-08), dan mengurangi biaya cetak dokumen dan ATK (RCO-10). Secara kuantitatif, KiPApp memberikan potensi penghematan biaya cetak/ATK sebesar ±Rp244 juta per tahun.

Kata Kunci: KiPApp, sistem informasi manajemen kinerja, evaluasi manfaat, Tabel Generik SI/TI

1. PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peran strategis sebagai ujung tombak dalam tata kelola pemerintahan. Peran ini menuntut ASN untuk bekerja secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada prioritas nasional [1]. Dalam menjalankan fungsinya, ASN tidak hanya bertanggung jawab atas tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi dan efisiensi [1]. Agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik kerja sehari-hari, diperlukan sistem yang mampu mengawal kinerja ASN. Untuk itu, pemerintah mengembangkan sistem manajemen kinerja ASN yang terstandarisasi melalui sejumlah regulasi.

Salah satu regulasi yang mengatur sistem manajemen kinerja ASN adalah PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Dalam regulasi tersebut sistem manajemen kinerja ASN dibangun atas prinsip-prinsip orientasi hasil, transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dialog antara atasan dan bawahan. Pembaruan paling menonjol dari regulasi ini terletak pada alur manajemen kinerja yang lebih terstruktur dan penekanan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan manajemen kinerja. Pembaruan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan administratif yang kaku ke sistem yang lebih partisipatif dan kolaboratif.

Merespon transformasi tersebut, BPS mengembangkan sistem informasi pengelolaan kinerja ASN yang digunakan secara internal yaitu aplikasi KiPApp (*keep up*). Namun, setelah digunakan selama 2 tahun, manfaat aplikasi KiPApp belum pernah diukur melalui evaluasi dalam bentuk apapun. Meskipun KiPApp merupakan aplikasi yang dikembangkan secara *in house* tanpa keterlibatan vendor eksternal, implementasinya tetap merepresentasikan bentuk investasi teknologi informasi terutama dari sisi alokasi sumber daya internal. Oleh karena itu, pengukuran manfaat dari implementasi KiPApp secara *tangible* maupun *intangible* menjadi relevan sebagai bagian dari evaluasi investasi TI di sektor publik [2], [3].

Evaluasi manfaat pada proyek SI/TI harus dilakukan segera setelah sistem stabil dan mulai digunakan secara nyata [4], [5]. Evaluasi ini merupakan bagian dari audit internal yang bertujuan memastikan bahwa sistem informasi berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Audit internal memiliki peran penting dalam menilai kecukupan pengendalian internal dan efektivitas

proses bisnis termasuk pengawasan atas penggunaan teknologi informasi [4]. Dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2019 menegaskan bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan teknologi informasi merupakan bagian penting dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan keamanan penggunaan TI di instansi pemerintah.

Pengukuran ini penting untuk memastikan apakah manfaat KiPApp selaras dengan tujuan implementasi manajemen kinerja yang tertuang dalam PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 [1]. Evaluasi ini belum pernah dilakukan karena di lingkungan BPS hingga saat ini belum memiliki metode yang terstandar untuk mengukur manfaat atau efektivitas proyek SI/TI [2]. Oleh karena itu, melalui penelitian ini dikembangkan prosedur pengukuran manfaat aplikasi KiPApp agar memastikan bahwa proyek-proyek SI/TI tidak hanya tuntas dari sisi teknis, tetapi juga memberikan dampak strategis bagi organisasi [2]. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau *benchmarking* BPS dan kementerian/lembaga lain dalam mengevaluasi proyek SI/TI khususnya manajemen kinerja pegawai.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami manfaat implementasi KiPApp di lingkungan BPS dari sudut pandang baik pengembang maupun pengguna. Pendekatan kualitatif menjelaskan data serta fakta yang benar-benar terjadi dilapangan berupa pengalaman yang dirasakan pegawai BPS dalam konteks proses manajemen kinerja baik sebelum implementasi KiPApp maupun selama menggunakan aplikasi KiPApp [6]. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang merupakan salah satu metode kualitatif yang paling populer sehingga sering digunakan dalam penelitian dibidang sistem informasi, ilmu sosial, bisnis, dan manajemen [7]. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap manfaat implementasi aplikasi KiPApp di lingkungan BPS sebagai aplikasi internal yang dikembangkan dan digunakan secara khusus oleh instansi tersebut. Tujuan penelitian bukan untuk menggeneralisasi hasil pada konteks lain, melainkan untuk menggali manfaat, tantangan, dan implikasi penerapan aplikasi ini pada situasi spesifik BPS. Tahapan studi kasus menurut [7] sebagai berikut.

2.1 Planning

Pada tahap perencanaan, dilakukan perumusan pertanyaan penelitian yang akan menjadi fokus utama studi ini. Selain itu, dilakukan juga kajian mendalam terkait kelebihan dan kekurangan beberapa metode atau kerangka kerja pengukuran manfaat investasi TI diantaranya *Cost Benefit Analysis* (CBA), *Information Economics*, dan Tabel Generik SI/TI. Setelah melakukan penilaian mendalam, peneliti memutuskan untuk menggunakan Tabel Generik SI/TI sebagai instrumen utama dalam identifikasi manfaat karena kerangka ini dianggap mampu mengakomodasi berbagai jenis manfaat secara terstruktur dan relevan dengan konteks organisasi sektor publik [3], [8].

2.2 Designing

Sebagaimana penelitian kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui beberapa metode, yaitu studi dokumen, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD) [9]. Selain itu, agar data yang diperoleh relevan dan mendalam, penarikan sampel narasumber dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti secara sengaja memilih individu yang memiliki pengalaman langsung dan signifikan terhadap fenomena yang diteliti [9] yaitu implementasi dan pemanfaatan aplikasi KiPApp. Adapun kriteria narasumber dalam penelitian ini ditetapkan sebagai pegawai BPS dengan masa kerja lebih dari empat tahun agar memiliki pengalaman yang memadai baik pada periode manajemen kinerja secara manual maupun pada masa transisi ke sistem digital. Selain itu, narasumber dipilih dari 2 bidang kerja, yaitu bagian sumber daya manusia (SDM) dan dari bidang non SDM untuk memperoleh perspektif yang beragam dalam pemanfaatan aplikasi KiPApp.

Pada tahap ini, disusun juga daftar pertanyaan wawancara yang dirancang dengan mengacu pada kategori dan subkategori yang tercantum dalam Tabel Generik SI/TI. Daftar pertanyaan tersebut berfungsi sebagai panduan sistematis bagi peneliti dalam menggali informasi yang relevan dan mendalam mengenai penerapan aplikasi KiPApp.

2.3 Preparing

Pada tahap ini dipersiapkan semua aspek yang diperlukan untuk pengumpulan data. Hal ini mencakup alat perekam, daftar pertanyaan, dan jadwal wawancara yang telah disepakati bersama narasumber.

2.4 Collecting

Data dikumpulkan melalui beberapa sumber, yaitu studi pustaka, diskusi kelompok, dan

wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Diskusi kelompok dilaksanakan pada tahap akhir untuk proses validasi hasil serta sebagai bagian dari wawancara pendahuluan. Sedangkan, wawancara dilakukan dengan menggunakan empat satuan kerja sebagai studi kasus, yaitu BPS RI, BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota, dan Politeknik Statistika STIS. Untuk representasi BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, masing-masing dipilih satu instansi, yakni BPS Provinsi DI Yogyakarta dan BPS Kabupaten Sleman. Pemilihan satuan kerja yang berbeda di luar DKI Jakarta didasarkan pada asumsi bahwa setiap satuan kerja memiliki budaya, struktur, dan beban kerja yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi persepsi terhadap implementasi aplikasi KiPApp [10].

Jumlah seluruh narasumber adalah 15 pegawai yang terdiri dari 4 orang pengembang dan 11 orang pengguna. Kelompok pengembang mencakup 1 orang dari Biro Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan sebagai *subject matter expert*, 2 orang *programmer*, serta 1 orang *project manager* yang juga menjabat sebagai ketua tim. Sementara itu, kelompok pengguna terdiri dari 5 ketua tim dan 6 anggota tim. Kriteria utama yang digunakan untuk memilih narasumber pengguna adalah ASN BPS dengan masa kerja lebih dari 5 tahun sehingga dianggap memiliki pengalaman yang cukup untuk mengevaluasi kondisi sebelum dan sesudah implementasi aplikasi KiPApp. Sebaran narasumber berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Narasumber

No.	Satuan Kerja	Kategori Narasumber	Jumlah
1	Direktorat SIS BPS Pusat	Pengembang	3
2	Biro SDM BPS Pusat		1
3	Direktorat SIS BPS Pusat	Pengguna	1
3	Tim SDM BPS Provinsi		2
4	Tim SPBE TIK BPS DIY		2
5	Tim Administrasi BPS Kab Sleman		2
6	Tim TIK BPS Kab Sleman		1
7	Bagian Administrasi Politeknik Statistika STIS		1
8	Dosen Politeknik Statistika STIS		2

2.5 Analyzing

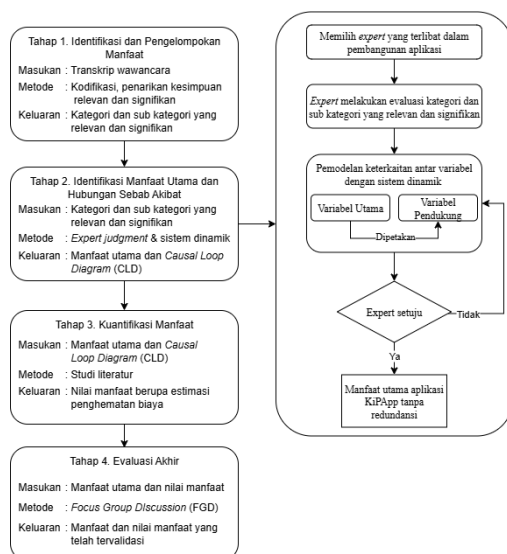
Penelitian ini menggunakan analisis tematik karena mampu mengakomodasi kompleksitas data naratif dan membantu mengidentifikasi berbagai manfaat yang dirasakan dari penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen kinerja tersebut [7]. Analisis mencakup pemeriksaan, pengkategorian, kodifikasi, tabulasi, pengujian atau dengan cara lain menggabungkan dan mempelajari bukti yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan [7].

A. Kodifikasi

Berdasarkan [11], setiap pernyataan narasumber pada transkrip wawancara diberikan kode wawancara yang unik. Kode tersebut disusun dengan format inisial huruf 'N' yang diikuti oleh nomor urut narasumber dan nomor urut kemunculan pernyataan dalam transkrip. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah pelacakan dan pengelompokan data selama proses analisis. Selanjutnya, kodifikasi deskriptif dengan cara memberikan label tematik pada setiap pernyataan berdasarkan makna yang dikalimat tersebut. Kodifikasi ini memfasilitasi proses pengelompokan pernyataan-pernyataan yang memiliki kesamaan substansi ke dalam tema yang relevan.

B. Pemetaan pada kerangka kerja

Penelitian ini menggunakan Tabel Generik SI/TI sebagai kerangka kerja utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis manfaat yang dihasilkan dari implementasi aplikasi KiPApp. Berikut tahapan pemetaan secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2 [6], [7], [11].



Gambar 1. Tahapan Analisis

Identifikasi Manfaat Aplikasi KiPApp

Setiap pernyataan narasumber yang telah dikodekan, dipetakan kedalam Tabel Generik SI/TI. Sebuah pernyataan dianggap relevan jika isi pernyataan tersebut berkaitan langsung dengan bisnis proses dalam aplikasi KiPApp atau sesuai dengan kondisi nyata manajemen kinerja ASN. Di sisi lain, sebuah subkategori dikatakan signifikan apabila membawa perubahan yang besar atau dampak nyata setelah implementasi KiPApp. Apabila sebuah subkategori hanya memenuhi salah satu kriteria, relevan atau signifikan, maka subkategori tersebut tidak masuk sebagai manfaat aplikasi KiPApp.

Selanjutnya, seluruh hasil pemetaan narasumber digabungkan dalam tabel agregat kemudian diidentifikasi manfaat dengan pendekatan *majority vote*. Subkategori yang paling banyak dinilai relevan dan signifikan oleh narasumber akan disimpulkan sebagai daftar manfaat aplikasi KiPApp yang relevan dan signifikan.

Identifikasi Manfaat Utama dan Analisis Hubungan Sebab-akibat

Daftar manfaat yang diperoleh pada tahap sebelumnya kemudian dianalisis lebih dalam untuk memperoleh manfaat utama dari aplikasi KiPApp dan menghilangkan duplikasi manfaat. Hal ini disebabkan karena suatu pernyataan narasumber sering kali mencerminkan lebih dari satu subkategori sekaligus. Penghilangan redundansi manfaat dilakukan dengan analisis keterkaitan hubungan sebab-akibat.

Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antar subkategori manfaat menggunakan pendekatan sistem dinamik. Adapun tahapan sistem dinamik [12] sebagai berikut.

1. Identifikasi Masalah

Tahapan ini adalah tahapan penentuan variabel utama dan variabel pendukung berdasarkan penilaian ahli. Variabel utama merupakan subkategori manfaat yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap dinamika sistem dan paling banyak diakui oleh para ahli sebagai manfaat yang telah dirasakan dan sesuai dengan tujuan awal implementasi KiPApp [12]. Sementara itu, variabel pendukung adalah subkategori yang tidak termasuk dalam variabel utama, tetapi tetap merupakan manfaat yang telah dirasakan dan telah divalidasi oleh para ahli [12].

Proses ini diawali dengan validasi awal menggunakan metode *expert judgement* yang melibatkan tiga orang ahli dari Biro SDM yang terlibat langsung dalam pengembangan aplikasi. Validasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama kuesioner bertujuan untuk menilai sejauh mana subkategori yang telah dinyatakan relevan dan signifikan dianggap benar-benar mencerminkan manfaat nyata dari aplikasi KiPApp. Sementara itu, bagian kedua kuesioner ditujukan untuk mengidentifikasi kembali tujuan awal dari pembangunan aplikasi KiPApp. Bagian kedua inilah yang menjadi fokus penilaian untuk mengelompokkan subkategori menjadi variabel utama dan variabel pendukung.

2. Konseptual Sistem dengan Pemodelan Diagram

Dilakukan pemodelan analisis keterkaitan hubungan sebab akibat yang digambarkan melalui *Causal Loop Diagram* (CLD). Variabel utama dan pendukung dipetakan dalam diagram kausal untuk melihat keterkaitan antar subkategori. Hasil akhir dari tahapan ini adalah sebuah CLD yang menggambarkan hubungan keterkaitan antarsubkategori berupa sebab-akibat dan menghasilkan daftar manfaat utama tanpa duplikasi.

Untuk mendukung proses analisis hubungan sebab-akibat, diperlukan landasan teori yang kuat agar setiap keterkaitan antar subkategori dapat dijelaskan secara logis dan sistematis. Hasil akhir analisis sebab-akibat kemudian divalidasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama para ahli yang sebelumnya telah terlibat dalam validasi awal. Validasi ini memastikan bahwa manfaat utama yang ditetapkan benar-benar mencerminkan hasil analisis yang sah dan sesuai dengan konteks organisasi. Proses ini menghasilkan daftar manfaat utama KiPApp yang telah tervalidasi dan terstruktur berdasarkan hubungan logis antar variabel penyusunnya.

Kuantifikasi Manfaat Aplikasi

Tahap berikutnya dalam penelitian ini adalah kuantifikasi manfaat aplikasi berdasarkan subkategori manfaat utama. Proses kuantifikasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar nilai manfaat dalam bentuk estimasi penghematan biaya semenjak implementasi KiPApp.

Evaluasi Akhir

Hasil akhir analisis sebab akibat kemudian divalidasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama para ahli yang sebelumnya telah terlibat dalam validasi awal. Validasi ini memastikan bahwa manfaat utama yang diperoleh benar-benar mencerminkan hasil analisis yang sah dan sesuai dengan konteks organisasi. Selain itu, validasi juga mencakup penilaian terhadap nilai kuantifikasi manfaat yang telah diestimasi sebelumnya, guna menjamin bahwa estimasi yang digunakan dalam analisis memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.6 Sharing

Hasil penelitian ini akan disampaikan dalam bentuk laporan skripsi dan didokumentasikan dalam bentuk prosedur pengukuran manfaat proyek SI/TI untuk BPS atau kementerian lembaga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Manfaat Aplikasi KiPApp

Hasil wawancara dari masing-masing narasumber yang telah melalui proses kodifikasi selanjutnya dipetakan ke dalam Tabel Generik SI/TI. Seluruh hasil pemetaan kemudian digabungkan ke dalam sebuah tabel agregat untuk memperoleh gambaran kolektif. Melalui pendekatan *majority vote* dari 13 kategori dan 73 subkategori diperoleh 19 subkategori yang dinilai relevan dan signifikan terhadap implementasi aplikasi KiPApp.

Tabel 2. Manfaat Aplikasi yang Relevan dan Signifikan

No.	Subkategori	Kode
1	Mengurangi/Menekan Biaya Cetak Dokumen dan ATK	RCO-10
2	Meningkatkan Produktivitas karena Restrukturisasi Pembagian Fungsi Kerja	IPR-01
3	Meningkatkan Produktivitas karena Kemudahan Analisis	IPR-03
4	Meningkatkan Kepuasan Karyawan	IPR-04
5	Mempercepat Proses Pembuatan Laporan	APR-03
6	Mempercepat Proses Pemeriksaan Permohonan	APR-05
7	Mempercepat Proses Pengambilan Keputusan	APR-08
8	Mengurangi Risiko dari Kehilangan Penyimpanan	RRI-03
9	Mengurangi Risiko dari Pemalsuan	RRI-09
10	Mengurangi Risiko dari Penipuan/Kecurangan Administrasi	RRI-10
11	Meningkatkan Kualitas Laporan	IRE-02
12	Meningkatkan Keakuratan dari Analisis	IAC-02
13	Meningkatkan Keakuratan dari Perencanaan	IAC-04
14	Meningkatkan Keakuratan dari Keputusan	IAC-05
15	Meningkatkan Mutu Layanan	IIM-01
16	Meningkatkan Citra yang karena Kepatuhan pada Aturan	IIM-03

Tabel 3. Teori Pendukung Hubungan Sebab Akibat

No.	Hubungan Sebab-Akibat	Teori	Referensi
1.	IIS-01 → IPR-01	Collaborative Advantage	[13]
2.	IPR-01 → IIS-02	Job Characteristics Model	[14]
3.	IIS-02 → IPR-04	Self-Determination Theory	[15]
4.	IPR-04 → IQU-01	Organizational Commitment	[16]
5.	RRI-03 → IIM-01	Information Systems Success Model	[17]
6.	IIM-01 → IRE-02	Technology Acceptance Model (TAM)	[18]
7.	IIM-01 → RCO-10	Wawancara dengan tim programmer	
8.	IIM-01 → APR-03 → APR-05	Information Systems Success Model	[17]
9.	APR-05 → APR-08	Decision Support System (DSS) Theory	[19]
10.	IRE-02 → RRI-09 & RRI-10	Agency Theory	[20]
11.	RRI-09 & RRI-10 → IIM-03	Institutional Theory	[21]
12.	IIM-01 → IPR-01	Technology Acceptance Model (TAM)	[18]
		Work System Theory oleh	[22]
13.	IPR-01 → IPR-03 → IAC-04 & IAC-05	Contingency Theory	[23]
14.	IAC-02 → IAC-04 & IAC-05	Bounded Rationality & Decision Making	[24]

Berdasarkan hasil pemodelan hubungan sebab-akibat menggunakan CLD pada Gambar 3 diperoleh enam subkategori.

1. Meningkatkan Kualitas Hasil Kerja (IQU-01)

Pembagian tugas yang terstruktur dan merata memastikan setiap pegawai dapat fokus pada pekerjaan utama. Pada akhirnya, hal tersebut merefleksikan prinsip berorientasi pada hasil yang menekankan pentingnya pencapaian *output* dan *outcome* secara nyata dari setiap pelaksanaan tugas serta kontribusi terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Kondisi ini turut membuka ruang pengembangan kapasitas individu karena pegawai lebih mampu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan sebagai bentuk peningkatan kapasitas diri. Oleh karena itu, implementasi KiPApp secara tidak langsung mendukung arah pengelolaan kinerja ASN, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PermenPANRB No. 6 Tahun 2022.

2. Meningkatkan Akurasi Perencanaan (IAC-04)

Penyusunan rencana kinerja diawal tahun memastikan bahwa setiap pekerjaan dapat terlaksana dengan lebih terarah, terdokumentasi, dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian organisasi atas target yang ditetapkan oleh atasan (IKU). Proses ini tidak bersifat sepihak, melainkan dibangun melalui interaksi aktif antara pimpinan dan pegawai. KiPApp menyediakan ruang untuk dialog tersebut untuk penyusunan SKP. Kondisi ini mencerminkan perwujudan nyata dari arah pengelolaan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 PermenPANRB No. 6 Tahun 2022, khususnya pada aspek penguatan kolaborasi antara pimpinan dan pegawai.

3. Meningkatkan Akurasi Keputusan (IAC-05)

KiPApp memfasilitasi pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data kinerja secara sistematis dan berbasis teknologi yang mengurangi potensi kesalahan manusia dan bias dalam evaluasi kinerja. Dengan implementasi KiPApp, pimpinan tidak lagi hanya mengandalkan intuisi atau kedekatan personal, tetapi dapat merujuk langsung pada rekam jejak kinerja yang terdokumentasi dalam sistem untuk memberikan penilaian, *reward*, bahkan *punishment*. Oleh karena itu, hal ini selaras dengan sasaran pengelolaan kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 PermenPANRB No. 6 Tahun 2022, khususnya pada aspek penguatan peran pimpinan.

4. Meningkatkan Citra karena Kepatuhan terhadap Aturan (IIM-03)

Salah satu dampak perbaikan manajemen kinerja ASN dilingkungan BPS adalah peningkatan ketertiban administrasi internal sebagai salah satu representasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Peningkatan kepatuhan ini secara langsung berkontribusi terhadap perbaikan citra organisasi karena mampu menunjukkan ketaatan terhadap regulasi.

5. Mempercepat Proses Pengambilan Keputusan (APR-08)

Transformasi digital dalam manajemen kinerja di BPS, khususnya melalui implementasi aplikasi KiPApp telah memberikan dampak nyata dalam mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis kinerja. Sebelumnya, proses penyusunan laporan kinerja memerlukan waktu yang panjang akibat data yang tersebar diberbagai sistem terpisah sehingga menghambat tahapan verifikasi dan evaluasi. Dengan KiPApp, seluruh data kinerja terintegrasi dalam sistem aplikasi

sehingga dapat dipantau secara *real time* oleh atasan.

6. Mengurangi Biaya Cetak Dokumen dan ATK (RCO-10)

Implementasi KiPApp dalam sistem manajemen kinerja pegawai berkontribusi pada efisiensi administrasi khususnya melalui pengurangan pencetakan dokumen fisik dan alat tulis kantor (ATK). Sebelum digitalisasi dilaksanakan, proses penyusunan, verifikasi, dan penyimpanan laporan kinerja dilakukan secara fisik. Melalui digitalisasi berbasis *database* yang diusung KiPApp, seluruh dokumen kinerja kini tercatat dan tersimpan secara digital dalam *database server* sehingga secara substansial menurunkan frekuensi pencetakan laporan serta meningkatkan keamanan data.

D. Kuantifikasi Manfaat Aplikasi

Berdasarkan hasil identifikasi manfaat utama, diperoleh satu subkategori yang dapat dikuantifikasikan sebagai estimasi penghematan biaya yaitu biaya cetak dokumen dan ATK. Subkategori lainnya tidak dapat diukur secara kuantitatif karena manfaat yang dihasilkan berupa perbaikan alur manajemen kinerja. Sebagai acuan dalam penghitungan, digunakan platform *Digipay* Satu Kementerian Keuangan Tahun 2024. Penggunaan platform ini dipilih karena menyediakan data harga barang dan jasa resmi yang digunakan dalam transaksi pengadaan BPS. Secara rinci, berikut perhitungan biaya cetak dokumen sebelum implementasi KiPApp.

1. Dokumen yang perlu dicetak setiap pegawai berupa dua lembar CKP target (CKPt), dua lembar CKP realisasi (CKPr), dan empat lembar penilaian, sehingga total dokumen yang dicetak per bulan mencapai delapan lembar. Dalam satu tahun, jumlah ini setara dengan 96 lembar. Selain itu, terdapat tambahan pencetakan tiga lembar SKP pada awal tahun dan empat lembar DP3 pada akhir tahun, sehingga menambah tujuh lembar per tahun. Dengan demikian jumlah total dokumen yang dicetak sebanyak 103 lembar.
2. Berdasarkan Laporan Kinerja BPS Tahun 2025, jumlah pegawai BPS per Tahun 2024 sebanyak 17.969 pegawai.
3. Harga isi ulang tinta 100 ml untuk *printer* Epson, Canon, HP, dan Brother tipe T6641, 664, GI-790, dan BT5000, yaitu sebesar Rp50.000 dengan kapasitas pencetakan diperkirakan mencapai sekitar 4.500 lembar kertas. Dengan demikian, biaya tinta untuk

mencetak satu lembar kertas adalah sekitar Rp12.

4. Berdasarkan hasil wawancara, BPS sering menggunakan kertas HVS A4 dengan berat 80 gram. Harga kertas HVS A4 merek Paper One adalah sebesar Rp60.000 per rim (500 lembar). Dengan demikian, harga kertas per lembar adalah Rp120.

Sebelum implementasi KiPApp, estimasi total pengeluaran tahunan untuk kebutuhan pelaporan manual di lingkungan BPS mencapai Rp244 juta. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi penggunaan 103 lembar kertas per pegawai dengan biaya masing-masing Rp12 untuk tinta dan Rp120 untuk kertas per lembar, dikalikan dengan jumlah pegawai BPS sebanyak 17.969 pegawai. Oleh karena itu, sejak implementasi KiPApp tahun 2023 BPS telah menghemat biaya cetak dokumen dan ATK sebesar Rp488 juta.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, identifikasi manfaat dari implementasi aplikasi KiPApp dengan menggunakan Tabel Generik SI/TI menghasilkan enam subkategori manfaat utama, yaitu: meningkatkan kualitas hasil kerja (IQU-01), meningkatkan akurasi perencanaan (IAC-04), meningkatkan akurasi keputusan (IAC-05), meningkatkan citra karena kepatuhan terhadap aturan (IIM-03), mempercepat proses pengambilan keputusan (APR-08), serta mengurangi biaya cetak dokumen dan ATK (RCO-10). Hasil analisis juga menunjukkan estimasi penghematan biaya BPS setelah implementasi KiPApp untuk biaya cetak dokumen/ATK sebesar Rp244 juta per tahun.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah adanya unsur subjektivitas, baik pada data yang bersumber dari persepsi responden maupun pada proses pemetaan dan analisis yang dilakukan. Untuk penelitian selanjutnya, apabila data keuangan tersedia, disarankan agar evaluasi manfaat aplikasi dapat dilengkapi dengan pendekatan kuantitatif melalui metode perhitungan investasi TI, seperti *Cost-Benefit Analysis (CBA)*, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang lebih objektif, komprehensif, dan terukur.

5. REFERENSI

- [1] A. Suryanto, A. Sudrajat, and S. Hadiati, *Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara*, 1st ed. Jakarta: Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia, 2021. [Online]. Available: <https://www.bppdapwi.com>

- [2] K. Rizkiyah, "Analisis Manfaat Investasi Integrated Collection System (ICS) Pada Penyelenggaraan Survei dan Sensus: Studi Kasus Badan Pusat Statistik RI," 2021.
- [3] B. Ranti and S. W. Nugroho, *Manajemen Investasi Teknologi Informasi*. Jakarta, 2020.
- [4] R. Heeks, *Implementing and Managing EGovernment An International Text*. London: SAGE Publisher, 2006.
- [5] O. Avila, S. Sastoque, and O. Cuevas, "A literature review of benefit analysis approaches for it projects in the public sector," in *ICEIS 2017 - Proceedings of the 19th International Conference on Enterprise Information Systems*, SciTePress, 2017, pp. 411–418. doi: 10.5220/0006333204110418.
- [6] J. Creswell and C. Poth, *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches Fourth Edition*. London, 2018.
- [7] J. Recker, *Scientific Research in Information Systems*. Springer Berlin Heidelberg, 2013. doi: 10.1007/978-3-642-30048-6.
- [8] D. Sualang, K. Stanley, and B. Ranti, "Identifikasi Manfaat Bisnis SI/IT Menggunakan Metode Ranti's Generic IS/IT Business Value (Studi Kasus: Dipenda Provinsi Sulawesi Utara)," 2009.
- [9] J. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design*, 5th ed. London: SAGE Publications, 2013.
- [10] E. H. Schein, *Organizational Culture and Leadership (4th ed.)*, 4th ed. Jossey-Bass, 2010.
- [11] J. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 2023.
- [12] J. Sterman, *Business Dynamics Systems Thinking and Modeling for a Complex World*, Thirteenth. Kundli: Rajkamal Electric Press, 2023.
- [13] C. Huxham and S. Vangen, *Managing to Collaborate The Theory and Practice of Collaborative Advantage*. 2005.
- [14] S. Park, "Motivating raters through work design: Applying the job characteristics model to the performance appraisal context," 2017, *Cogent OA*. doi: 10.1080/23311908.2017.1287320.
- [15] K. McAnally and M. S. Hagger, "Self-Determination Theory and Workplace Outcomes: A Conceptual Review and Future Research Directions," Jun. 01, 2024, *Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)*. doi: 10.3390/bs14060428.
- [16] A. Azmy, "The Roles of Organizational Commitment, Emotional Intelligence, and Job Satisfaction for Improving Employee Performance at a Construction Company," *Binus Business Review*, vol. 14, no. 3, pp. 307–319, Oct. 2023, doi: 10.21512/bbr.v14i3.9809.
- [17] W. H. DeLone and E. R. McLean, "The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update," in *Journal of Management Information Systems*, M.E. Sharpe Inc., 2003, pp. 9–30. doi: 10.1080/07421222.2003.11045748.
- [18] F. D. Davis, *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. Mi, 2013.
- [19] H. J. Watson, "Revisiting ralph sprague's framework for developing decision support systems," *Communications of the Association for Information Systems*, vol. 42, no. 1, pp. 363–385, 2018, doi: 10.17705/1CAIS.04213.
- [20] A. K. Mishra, "The Digital Transformation of Financial Disclosure: How Emerging Technologies Are Revolutionizing Corporate Transparency and Investor Trust," *Journal of Advanced Research in Operational and Marketing Management*, vol. 08, no. 02, pp. 11–25, Apr. 2025, doi: 10.24321/2582.5399.202502.
- [21] O. Fields, P. J. Dimaggio, and W. W. Powell, "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Ratioationality in Organizational Fields," 1983.
- [22] S. Alter, "Why Are So Many Systems Such a Mess?," in *The Work System Method*, 2006.
- [23] D. B. Pacheco-Cubillos, J. Boria-Reverter, and J. Gil-Lafuente, "Transitioning to Agile Organizational Structures: A Contingency Theory Approach in the Financial Sector," *Systems*, vol. 12, no. 4, Apr. 2024, doi: 10.3390/systems12040142.
- [24] R. Viale, S. Gallagher, and V. Gallese, "Bounded rationality, enactive problem solving, and the neuroscience of social interaction," *Front Psychol*, vol. 14, 2023, doi: 10.3389/fpsyg.2023.1152866.